

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

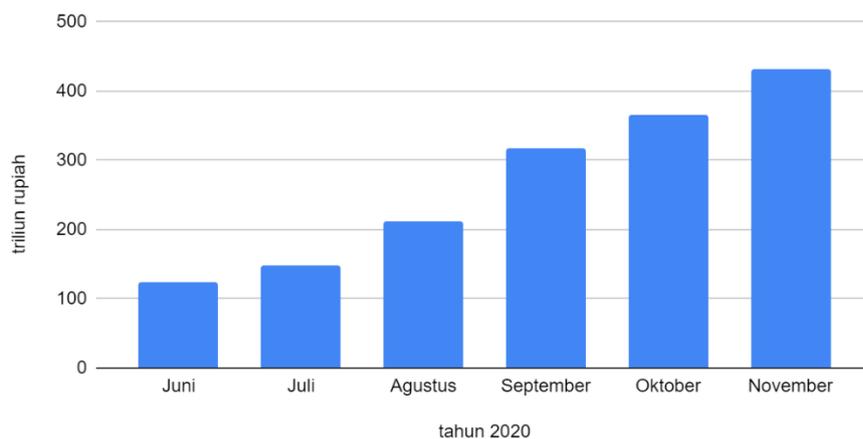
Pandemi COVID-19 telah memukul UMKM dengan terdisrupsi sisi penawaran dan guncangan permintaan. Berdasarkan laporan OECD (2020), dari 132 negara yang diobservasi ditemukan bahwa 2/3 UMKM merasakan dampak COVID-19 terhadap operasi bisnis, 1/5 UMKM memutuskan untuk tutup usaha secara permanen setelah 3 bulan terjadinya pandemi, dan dari 5.800 UMKM di Amerika Serikat, 43% tutup sementara dan 3/4 UMKM hanya memiliki 2 bulan pendanaan untuk bertahan serta mengoperasikan bisnisnya di masa pandemi. Hal serupa juga dialami oleh UMKM yang ada di Indonesia, dari 37.000 UMKM yang melapor ke Kemenkop UKM, 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% pelaku melaporkan permasalahan terkait pendanaan, 15% mengalami kendala distribusi barang, dan 4% melaporkan permasalahan terkait akses bahan baku mentah (Pakpahan, 2020). Dampak dari pandemi COVID-19 dari sisi penawaran dikarenakan adanya perubahan penawaran tenaga kerja, rantai pasok yang terdistrupsi untuk barang setengah jadi, serta kerentanan UMKM dalam menyesuaikan biaya yang timbul akibat adanya pembatasan sosial yang mengubah pola kerja menjadi lebih digital. Dari sisi permintaan, konsumen mengalami penurunan pendapatan yang disertai dengan ketakutan serta ketidakpastian keadaan ekonomi yang berakibat pada pengurangan pengeluaran. Begitu juga halnya dengan pasar keuangan dimana terjadi penurunan tingkat kepercayaan dan keinginan untuk meminjam melalui layanan keuangan (Graham et al., 2020).

Respons kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan *emergency liquidity*. Menurut *Yale University*, hingga April 2020 kebijakan fiskal paling banyak digunakan (45% dari total kebijakan), diikuti makroprudensial (35%), moneter (11%), dan *emergency liquidity* (9%) (Suksmonohadi & Indira, 2020). Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022 memberikan gambaran upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan stimulus usaha dapat

dikelompokkan menjadi 8 kebijakan, yaitu penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM, subsidi bunga kredit UMKM, insentif perpajakan, Dana Insentif Daerah (DID), stimulus modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak COVID-19, penjaminan modal kerja, penyertaan ke Bank Himbara, dan Banpres Produktif. Realisasi penyaluran sejumlah program PEN terhadap sektor UMKM sampai dengan bulan Desember 2020 sudah mencapai Rp 440,03 triliun. Angka ini setara dengan 63,1 persen dari total pagu yang mencapai Rp 695,2 triliun. Penyerapan anggaran berangsur naik setelah sebelumnya pada bulan November 2020, baru mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8 persen (Tarigan et al., 2022).

Gambar 1 Realisasi Program PEN

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: Katadata, 2021

Pandemi COVID-19 juga memberikan beban dan resiko terhadap pasar keuangan dan perekonomian sehingga hal ini juga mendapat respon yang ketat dari otoritas moneter. Kebijakan moneter diarahkan untuk mempertahankan kestabilan harga, menjamin lancarnya lalu lintas pasar keuangan, dan memastikan efektivitas peralihan atau transmisi kebijakan moneter. Beberapa kebijakan yang diberlakukan adalah dengan memangkas suku bunga, pembelian SBN atau surat berharga negara, intervensi ke pasar uang, menjaga *capital flows*, dan menjalin *swap arrangement*. Kebijakan penurunan suku bunga dilakukan dengan cukup agresif pasca merebaknya COVID-19 dan diiringi dengan berbagai kebijakan lainnya. Bank

sentral melonggarkan giro wajib minimum dan menempuh kebijakan *unconventional (quantitative easing/QE)* melalui pembelian surat berharga pemerintah dan swasta. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia juga memastikan pasar keuangan tetap berputar dengan menstimulus transaksi di pasar uang dan menjamin ketersediaan likuiditas perbankan demi berlangsungnya penyaluran kredit. Di berbagai belahan dunia, bank sentral selaku otoritas moneter menanggapi kondisi yang memburuk akibat pandemi ini dengan memberikan dukungan finansial pada korporasi besar seperti perusahaan penerbangan dan juga kepada pemerintah daerah. Hal ini merupakan kondisi luar biasa dimana kebijakan tersebut tidak diberlakukan pada masa krisis keuangan global 2008-2009 terutama oleh AS. Kebijakan bank sentral yang akomodatif tercermin pada neraca bank sentral yang meningkat signifikan. Kebijakan moneter akomodatif telah meredam fluktuasi *money market* dan membangun kepercayaan pelaku pasar. Indeks harga saham mengalami peningkatan dan aliran modal mulai kembali masuk ke *emerging market*. Kepercayaan pasar semakin bertambah dengan adanya pernyataan berbagai bank sentral yang siap melakukan kebijakan lanjutan. Dukungan kepada korporasi dan UMKM juga diharapkan dapat mencegah kebangkrutan dan menekan pemutusan hubungan kerja (Suksmonohadi & Indira, 2020).

Berbagai bauran kebijakan telah diusung untuk memulihkan UMKM dari dampak pandemi. Kebijakan yang diambil oleh beberapa negara yang diteliti oleh OECD antara lain; (i) Menambah gaji dalam bentuk subsidi pada UMKM dengan kesulitan pembayaran upah pegawai, (ii) Mendukung dan mengembangkan inovasi wiraswasta untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja yang menganggur, (iii) Relaksasi utang atau penangguhan pembayaran kredit, (iv) Memberikan pinjaman atau bantuan dana langsung, dan (v) Mengakselerasi digitalisasi usaha UMKM sehingga pelaku UMKM tetap dapat beroperasi di tengah keterbatasan mobilitas di masyarakat. Beberapa negara dalam laporan ini juga melakukan intervensi pasar tenaga kerja dalam bentuk subsidi gaji/upah dengan presentase sebesar 36%, reaktifisasi tenaga kerja dengan training sebesar 11%, penyesuaian tata kelola dan regulasi sebesar 11%, dan mengurangi jam bekerja sebesar 11% (Gentilini et al., 2020).

Pandemi menuntut diberlakukannya solusi strategis jangka pendek dan jangka panjang dalam pemulihan UMKM terdampak pandemic (Pakpahan, 2020). Solusi jangka pendek yang dimaksud adalah; (i) Pemerintah bersama aparat sipil dapat melakukan pengawasan dari penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga perizinan UMKM untuk menjalankan usahanya dapat diberikan, (ii) Memberikan relaksasi atau kelonggaran kredit hingga enam bulan untuk memperkuat fondasi likuiditas UMKM dan menyederhanakan proses administrasi pengajuan kredit, (iii) Menggelontorkan insentif pada pelaku UMKM, dimana pemerintah Indonesia telah menganggarkan hingga 17,3% yang diperuntukkan pada insentif pajak serta memberi stimulus kredit usaha rakyat (KUR) yaitu senilai Rp70,1 triliun dari Rp405,1 triliun anggaran untuk mengatasi pandemi COVID-19 dari dana APBN 2020, dan (iv) Kebijakan struktural yang bersifat jangka pendek seperti sosialisasi dan edukasi penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk proses produksi, promosi, dan menemukan pasar potensial, serta kebijakan struktural jangka panjang berupa pembuatan peta pengembangan UMKM dalam mempersiapkan diri menuju Industri 4.0. hingga ke pelosok daerah, melibatkan akademisi, dan menggandeng usaha swasta ataupun BUMN dengan optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa bantuan dana langsung atau melibatkan UMKM dalam proses produksi.

Pemberlakuan pembatasan sosial dan perubahan preferensi konsumen seperti tingginya jasa layanan pesan antar makanan hingga 30% (Burhan, 2020) dan peningkatan belanja online melalui *e-commerce* hingga 400% (Wibowo, 2020), maka pemerintah bersama BUMN, BUMD, ataupun *stakeholder* lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan berupa ruang dan layanan digital untuk transaksi, pengenalan *digital marketing* untuk strategi promosi dan pemasaran yang efisien, serta pembinaan dan menstimulus pada pelaku UMKM untuk melakukan inovasi serta strategi bisnis yang fleksibel terhadap perubahan situasi dan kecenderungan konsumen (Sugiri, 2020). Dalam pemulihan UMKM melalui strategi jangka panjang, pemerintah juga dapat menyediakan model pembinaan yang tepat sasaran dengan berkolaborasi dengan institusi ataupun lembaga akademisi di bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar UMKM memiliki

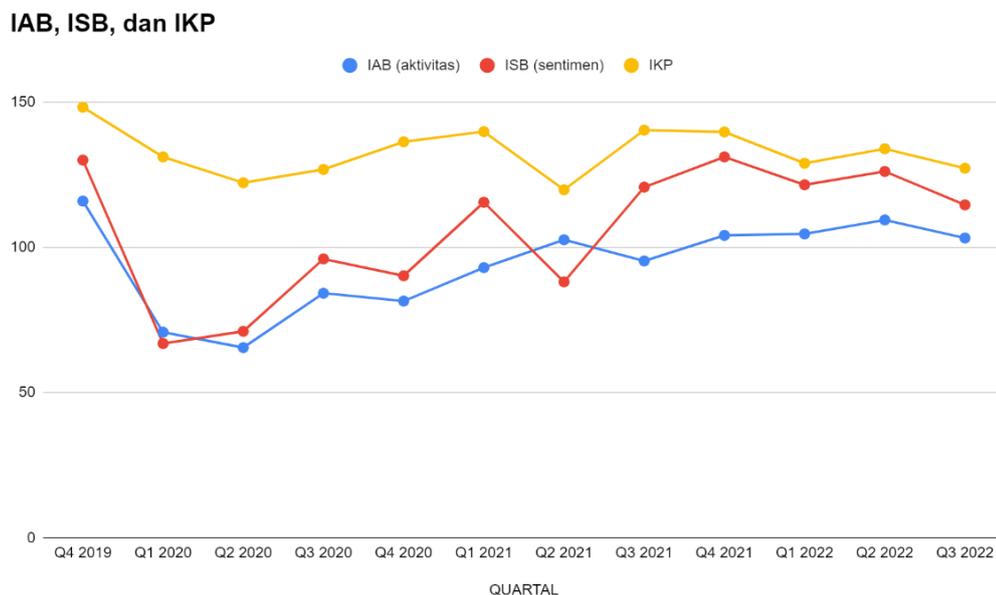
arahan dan edukasi yang tepat dalam menjalankan usahanya (Sugiri, 2020). Sebagaimana penelitian dengan studi kasus Kota Yogyakarta, model analisis untuk pengembangan dan perumusan strategi bisnis seperti *Business Model Canvas* (BMC) terbukti mumpuni sebagai perumusan strategi pengembangan UMKM pasca pandemi (Hadi & Supardi, 2020).

Berbagai entitas dan lembaga turut mengambil peran dalam proses pemulihan UMKM mulai dari bantuan biaya, pelatihan, festival, dan sebagainya. Penyelenggara kegiatan ini beragam mulai dari *startup*, perusahaan FMCG, BUMN, hingga kedinasan dan perangkat daerah. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat studi kasus Rumah Kreatif BUMN yang merupakan program binaan langsung oleh 26 BUMN yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. PT BRI Tbk merupakan salah satu BUMN perbankan yang berfokus pada pengembangan dan pemodalan usaha kecil menengah dan dibuktikan dengan dominasi penyaluran KUR hingga 70% dibandingkan bank BUMN lainnya. PT BRI Tbk memiliki 54 RKB di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya berada di Kota Bukittinggi yang terkenal sebagai Kota Pariwisata dan pusat perdagangan terbesar kedua di Sumatera Barat. Pembinaan dari RKB ini secara langsung menyasar pelaku UMKM untuk peningkatan kualitas sumber daya, kemampuan berpikir dan mengambil keputusan bisnis, serta bersaing dengan pasar digital seperti saat ini. Sebagai Agent of Development, fungsi utama RKB di bawah binaan PT BRI Tbk adalah untuk mengembangkan UMKM dengan berbagai manfaat langsung yang akan dirasakan oleh pelaku usaha diantaranya: akses pemodalan (baik KUR ataupun PKBL), pelatihan dan pembimbingan (dalam bentuk pelaksanaan kelas pembelajaran), modul, dan fasilitas lainnya. Selama adanya pandemi, RKB BUMN aktif menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha UMKM binaan.

Stimulus paket kebijakan yang saling terkoordinir ini membuahkan hasil yang signifikan bagi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang diterbitkan oleh *BRI Research Institute* yang menjabarkan 3 indeks yaitu Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB), dan Indeks Kepercayaan Pemerintah (IKP). IAB merupakan penilaian UMKM atas aktivitas bisnis secara mikro dan

perhitungan indeks IAB berdasarkan penilaian terhadap volume produksi, total nilai penjualan, rata-rata harga jual, volume pesanan, barang input, barang jadi, jumlah karyawan dan realisasi investasi. Sementara ISB merupakan indeks penilaian pelaku UMKM atas kondisi bisnis secara makro dengan menilai kondisi ekonomi nasional, sektor usaha responden, dan kondisi usaha responden secara umum. IKP adalah penilaian pelaku UMKM terhadap kinerja pemerintahan atas penilaian terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, menstabilkan harga, menyediakan infrastruktur, memberikan rasa aman, dan menegakkan hukum.

Gambar 2. Indeks UMKM



Sumber: data BRI Research Institute 2022, diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa tren dari aktivitas bisnis pasca pandemi adalah positif. Setelah penurunan tajam di Q1 2020 hingga 45 poin, indeks bisnis UMKM terus tumbuh dengan stabil. Beberapa penurunan terjadi di Q3 2021 yang disebabkan oleh PPKM darurat karena tingginya kasus COVID-19 varian delta dan Q3 2022 akibat naiknya harga BBM. Demikian halnya dengan kepercayaan pemerintah yang positif tapi berkontraksi di Q2 2021 karena adanya ketakutan akan penanganan dari virus delta dan terus tumbuh melambat karena berbagai gejala ekonomi dan politik yang menyebabkan inflasi serta kelangkaan bahan baku. Pada

indeks sentimen bisnis, terdapat fluktuasi yang curam yang dipengaruhi oleh situasi politik, stabilitas harga, dan adanya ketakutan akan penyebaran gelombang virus covid mulai dari *delta* hingga *omicron*.

UMKM dan perekonomian sudah mulai pulih, sinergi kebijakan, percepatan digitalisasi dan penghapusan pembatasan jarak telah mengakselerasi geliat ekonomi. Pertumbuhan dan pemulihan pasca pandemi ini sangat dirasakan oleh berbagai sektor yang sebelumnya terdampak pembatasan sosial seperti perdagangan, pariwisata, dan industri jasa. Kota Bukittinggi yang menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata dan UMKM mengalami pemulihan ekonomi yang massif sejak pelonggaran kebijakan terkait mobilitas dan kampanye kegiatan bertajuk ekonomi kreatif, Kota Bukittinggi kembali dipadati wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Bukittinggi, Hendry mengatakan, kunjungan ke Kota Bukittinggi mengalami peningkatan di tahun 2022 ini. Peningkatan tersebut paling banyak terjadi di dua objek wisata andalan Kota Bukittinggi. Hingga November 2022, kunjungan ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi sudah di angka 861.000 pengunjung dan total pengunjung Taman Panorama adalah sebanyak 202.000 pengunjung. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Akan tetapi, UMKM mendapatkan tantangan baru di masa pemulihan pandemi ini. Laporan yang dirilis oleh OECD tentang *SME and Entrepreneurship outlook 2023* menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina memberikan dampak tidak langsung pada kenaikan harga energi, tendensi geopolitik, inflasi yang tinggi, pengetatan fiskal dan finansial, serta minimnya bantuan baik moneter maupun fiskal (OECD, 2023). Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, berbagai produsen mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal serupa juga dialami oleh Indonesia dimana lonjakan harga dan kebijakan pengurangan subsidi BBM menimbulkan inflasi dari sisi penawaran. Laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia Sumatera Barat per November 2022 (kuartal III), menunjukkan perlambatan pertumbuhan di angka 4,54% (yoy) dibandingkan kuartal II yang tumbuh 5,08% (yoy). Inflasi mencapai 8,49% (yoy) yang lebih tinggi dari kuartal II 2022 sebesar 6,60% (yoy) yang bahkan inflasi Sumatera Barat jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 5,95% (yoy). Penyebab utama kenaikan harga ini disumbang oleh

kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,67% (yoy) dikarenakan naiknya harga komoditas sebagai imbas dari curah hujan yang tinggi, meningkatnya biaya produksi dikarenakan harga pupuk dan ongkos transportasi (penyesuaian harga BBM), dan naiknya tarif cukai rokok (www.bi.go.id, 2022).

Kota Bukittinggi yang saat ini mengalami pemulihan dikarenakan meningkatnya mobilitas dan pariwisata, secara spasial berada pada urutan 1 dari 24 kota yang mengalami inflasi di kawasan Sumatera dan dari 90 kota yang mengalami inflasi di Indonesia (DJPB Kemenkeu, 2022). Tercatat pada kuartal III 2022, inflasi kota Bukittinggi mencapai 8,20% (yoy). Tingginya angka inflasi ini disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dimana nilai inflasinya adalah 12,42% dan memberikan andil 4,41% (yoy), diikuti oleh kelompok transportasi yang didorong oleh bensin, angkutan kota, dan tarif kendaraan *online* sebesar 18,14% dengan andil 2,09% (yoy). Tingginya nilai inflasi Kota Bukittinggi tentunya berdampak pada harga jual, daya saing, serta kemampuan produsen untuk memproduksi barang dan jasa dikarenakan tingginya biaya yang harus dikorbankan.

Permasalahan yang menjadi landasan kepenulisan ini adalah, dengan adanya perbaikan struktur ekonomi dan kembalinya wisatawan yang menggerakkan ekonomi di Kota Bukittinggi, yang mana merupakan dampak dari pemulihan covid-19, pelaku UMKM (produsen) dihadapkan pada masalah baru berupa inflasi yang memberikan pukulan dari sisi penawaran. Oleh karena itu, produsen harus mengalokasikan sumber daya dan kemampuan manajerial yang mereka miliki untuk membuat suatu keputusan yang pelik di kondisi *recovery* pandemi ini. Penulis menggunakan kerangka berpikir yang mengacu pada Teori Perilaku Produsen dan *Profit Maximization* untuk menganalisis pilihan apa saja yang dapat dilakukan oleh produsen selama masa pemulihan pandemi dan menggunakan teknik AHP untuk melakukan pembobotan kriteria dalam menganalisis faktor pemulihan UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan dan kemampuan produsen UMKM dalam menghadapi masa pemulihan pandemi COVID-19?
2. Apa saja kriteria dan alternatif produsen dalam memaksimalkan profit selama pemulihan pandemi COVID-19?
3. Alternatif manakah yang paling dibutuhkan UMKM dalam memaksimalkan profit di masa pemulihan pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kemampuan produsen UMKM untuk pulih pasca pandemi COVID-19
2. Menganalisis dan merumuskan kriteria serta alternatif bagi produsen dalam memaksimalkan profit pasca pandemi COVID-19
3. Menghitung dan melakukan pembobotan terhadap berbagai alternatif perilaku produsen yang paling dibutuhkan dalam memaksimalkan profit pasca pandemi COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran analisis dari terapan teori perilaku produsen selama masa pemulihan pandemi.
2. Bagi produsen UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat keputusan untuk maksimalisasi profit sesuai dengan faktor produksi.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk menggiat program pemberdayaan dan dukungan terhadap produsen UMKM sesuai dengan alternatif pilihan perilaku produsen yang ada, sehingga program yang ada dijalankan tepat sasaran.
4. Bagi *civitas academica* dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpikir dan justifikasi dalam melihat permasalahan, perilaku, dan keputusan produsen UMKM